

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah sangat penting bagi bendahara atau calon bendahara agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam melaksanakan tugas mengelola uang negara. Sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 1 ayat 8 disebutkan bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam meminimalkan penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan sasaran dan tujuan pembangunan tidak tercapai secara maksimal, dengan adanya pengelolaan keuangan dan sistem keuangan yaitu di Banyumas menggunakan sistem yang bernama satria keuangan dapat mencegah praktek- praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pelaksanaan peraturan – peraturan yang memberikan sanksi yang tegas terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang – undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul "Sistem keuangan Langsung dan Ganti Uang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banyumas. Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Langsung dan Ganti Uang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banyumas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat ingin untuk mengetahui dan mengupas bagaimana Sistem Keuangan Langsung dan Ganti Uang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

a. Maksud Praktik Kerja Lapangan:

- 1) Untuk memahami dan mengetahui secara langsung sistem keuangan Langsung dan Ganti Uang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Untuk melengkapi syarat kelulusan studi pada program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

b. Tujuan Praktik Kerja Lapangan:

- 1) Untuk mencari pengalaman kerja, mengimplementasikan ilmu dan meningkatkan kemampuan di bidang akuntansi.

- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem akuntansi pemerintah khususnya mengenai sistem keuangan langsung dan ganti uang keuangan unit akuntansi keuangan bendahara umum negara daerah pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
- 3) Untuk memperoleh gambaran pekerjaan secara nyata mengenai teori sistem akuntansi pemerintah yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya mengenai praktik sistem keuangan langsung dan ganti uang diperkim.

c. Manfaat Praktik Kerja Lapangan:

a) Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan mendalami ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dibidang akuntansi pemerintah.
- 2) Sebagai sarana untuk menganalisis dan membandingkan mengenai ilmu teori yang didapat dengan hasil praktik kerja lapangan yang sesungguhnya di dunia pekerjaan.
- 3) Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan menambah relasi dalam lingkup kerja yang profesional
- 4) Sebagai sarana untuk melatih dan meningkatkan kemampuan *softskill* di dunia kerja
- 5) Sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir

b) Manfaat Bagi Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- 1) Sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kurikulum dan silabus yang dapat menghasilkan lulusan yang lebih profesional di bidangnya.
 - 2) Sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas lulusan tenaga ahli madya yang terbaik khususnya Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 - 3) Sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Dinperkim Banyumas.
 - 4) Sebagai hasil dari praktik kerja lapangan yaitu menghasilkan Tugas Akhir yang dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan baik internal maupun eksternal.
- c) Manfaat Bagi Instansi Praktik Kerja Lapangan
- 1) Mendapatkan sudut pandang atau penilaian secara nyata mengenai kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto khususnya Akuntansi DIII.
 - 2) Sebagai suatu bentuk partisipasi dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Karena keterbatasan penulis, maka penelitian ini hanya

membatasi masalah pada Sistem Keuangan LS dan GU pada Dinperkim Banyumas.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan sumber data sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinperkim Banyumas. Data primer dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan. Penulis memperoleh sumber sumber pendukung pembuatan Tugas Akhir yang berhubungan dengan Sistem Keuangan LS dan GU pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada saat PKL.

2) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung. Wawancara

dilakukan dengan Pelaksana Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (Veraki) yang berhubungan langsung dengan data yang diperlukan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara pada Dinperkim Banyumas. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat meningkatkan kualitas dalam pengumpulan data. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Pengambilan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data yang terdapat dalam buku catatan, serta diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen yang terdapat pada Dinperkim Banyumas yang berhubungan erat dengan Sistem Keuangan LS dan GU Pada Dinperkim Banyumas.

2) Studi Pustaka

Pengambilan data dengan metode studi pustaka diperoleh dengan buku-buku yang ada di Dinperkim Banyumas. Studi pustaka menjadi bagian yang penting dalam kegiatan penelitian karena memberikan informasi mengenai Sistem Keuangan LS dan GU pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banyumas.

1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan PKL

No	Kegiatan	November				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN																					
1.	Observasi ke lokasi PKL																				
2.	Meminta surat permohonan izin PKL dari fakultas																				
3.	Konfirmasi persetujuan izin PKL																				
4.	Mengajukan judul TA																				
TAHAP PELAKSANAAN																					
5.	Melaksanakan PKL																				
6.	Observasi dan praktik langsung berkaitan dengan judul TA																				
7.	Wawancara dengan pegawai sesuai judul TA																				
TAHAP PELAPORAN																					
8.	Meminta beberapa dokumen untuk dianalisis dan dipelajari terkait dengan judul TA																				
9.	Membuat Laporan TA																				

Sumber: Panduan Laporan Tugas Akhir 2020